

Permasalahan Aktual untuk Menyusun Model Aplikatif Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Aceh

Bahrin¹, Niswanto², Maimun³

¹Universitas Syiah Kuala – bahrin@unsyiah.ac.id

²Universitas Syiah Kuala

³Universitas Syiah Kuala

Abstrak— Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, hal ini terkait dengan upaya melahirkan lulusan SMK yang siap kerja. Untuk itu, diperlukan sebuah model pengembangan sekolah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model pengembangan melalui revitalisasi SMK di Aceh yang sudah berjalan dalam tiga tahun terakhir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa *descriptive methode*, yaitu menggambarkan secara detail kondisi SMK yang ada di masing-masing daerah studi yang tersebar di Provinsi Aceh berdasarkan kebijakan revitalisasi. Data dikumpulkan melalui telaah dokumentasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) yang sebagiannya dilakukan secara *online* menyesuaikan dengan SOP kehidupan normal baru dalam masa pandemi Covid-19. Kajian ini menghasilkan kondisi SMK program revitalisasi baik negeri maupun swasta sesuai dengan fokus revitalisasi SMK. Kondisi yang terungkap bahwa tingkat efektivitas revitalisasi masing dalam kategori rendah yang ditunjukkan oleh belum tercapainya dengan baik indikator kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja secara umum; pendidik dan tenaga kependidikan; kerjasama dengan DUDI; sertifikasi dan akreditasi; dan sarpras dan kelembagaan. Beranjak dari kondisi tersebut diajukan rekomendasi yang dipandu oleh peta jalan revitalisasi SMK dengan rincian langkah untuk setiap fokus revitalisasi di atas.

Kata Kunci — Model Aplikatif, Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan nasional didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan ketrampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Saat ini terdapat tantangan yang dihadapi Indonesia. Tantangan pertama adalah hadirnya revolusi industri keempat yang sekarang mulai berlangsung. Tidak ada faktor pendorong perubahan peradaban dunia sekuat revolusi industri yang menghasilkan kemajuan teknologi. Akibat kemajuan teknologi, dunia berubah begitu cepatnya. Berbeda dengan revolusi industri ketiga ketika mesin bekerja sendirisendiri, pada era revolusi industri keempat semua mesin dihubungkan dengan yang lain, bertumpu pada cyber physical system yang akan mengubah secara radikal cara manusia berkehidupan, bekerja, dan berkomunikasi.

Indonesia perlu menyiapkan generasi inovator untuk mengolah keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah menjadi produk barang/jasa yang bernilai, dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Untuk itu, pembelajaran di SMK harus mengembangkan keterampilan Abad XXI agar menghasilkan lulusan yang “innovative, inventive, self-motivated and self-directed, creative problem solvers to confront increasingly complex global problem” (Trilling and Fadel, 2010).

Dinamika Pasar Kerja yang terus terjadi perubahan di pasar kerja dapat diindikasikan oleh perubahan penyerapan tenaga kerja lulusan sistem pendidikan dan pelatihan. Dari sudut pandang sistem pendidikan dan pelatihan, perubahan penyerapan tersebut dimaknai sebagai tingkat

keberhasilan lulusan. Jika ditinjau dari tingkat keberhasilan lulusan, pada jenjang pendidikan menengah terindikasi terjadi perubahan kecenderungan tingkat keberhasilan lulusan SMK dan SMA.

Sesuai dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15, keberadaan SMK dirancang untuk mempersiapkannya bekerja di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah kejuruan ditujukan untuk penyiapan lulusan yang siap kerja, baik secara mandiri maupun pada industri tertentu. Layanan pendidikan/pelatihan vokasi diberikan mulai jenjang pendidikan menengah, yakni SMK dan SMK-LB, serta jenjang pendidikan tinggi, yakni Politeknik dan program Diploma di universitas. Pemberian layanan pendidikan dapat melalui jalur formal (persekolahan, seperti SMK) maupun nonformal melalui kursus dan pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Inpres ini merupakan landasan kebijakan untuk pembenahan dan pengembangan SMK agar mampu menghasilkan kualitas lulusan yang mampu mengisi kebutuhan pasar tenaga kerja di Indonesia.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan actual pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di propinsi Aceh dan menemukan model pemecahan masalah yang aplikatif untuk pengembangan SMK di depan. Yaitu dengan cara: Melakukan kajian efektivitas revitalisasi SMK di Aceh; Melakukan klasifikasi jenis dan jumlah SMK di Aceh; Menilai kesesuaian program keahlian yang dibuka di SMK dengan dukungan potensi sumber daya alam dan karakteristik daerah; Menganalisis kesenjangan antara ketersediaan SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di daerah tersebut; Menganalisis kendala yang dihadapi SMK dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di Aceh; Menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai dengan program keahlian di SMK dan tempat praktek Kerja Industri yang memenuhi persyaratan; dan Menilai capaian keberhasilan revitalisasi SMK yang dilakukan di Aceh.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berupa descriptive methode, yaitu menggambarkan secara detail kondisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di masing-masing daerah studi yang tersebar di Provinsi Aceh. Data dikumpulkan melalui telaah dokumentasi, wawancara, observasi dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion). Terkait dengan telaah dokumentasi dimaksudkan untuk mendeskripsikan kondisi riil seluruh SMK Negeri dan Swasta yang ada dalam wilayah Provinsi Aceh (23 kabupaten/kota). Sedangkan wawancara dan observasi dimaksudkan untuk menemukan informasi yang lebih mendalam dan komprehensif di wilayah sampel. Sampel yang akan dijadikan sekolah sasaran untuk dilakukan analisis efektivitas revitalisasi SMK diambil sebanyak 10 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota diambil 3 (tiga) SMK sebagai sampel yang diambil berdasarkan dari jurusan/program yang berbeda di sekolah sasaran. Informasi yang diharapkan dari setiap SMK sasaran berkenaan tentang pelayanan sesuai dengan 9 (sembilan) standar pendidikan nasional. Sedangkan diskusi kelompok terfokus (FGD) dimaksudkan untuk membahas rumusan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan jurusan/program revitalisasi SMK. Sesuai instrumen penelitian yang digunakan, maka yang menjadi subyek penelitian adalah kepala SMK di masing-masing satuan pendidikan dan ketua MKKS SMK di masing-masing kabupaten/kota dan para wakil kepala sekolah yang membidangi bidang sarana dan prasarana yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk menghimpun data tersebut melibatkan pencacah (enumerator) di mana setiap kabupaten/kota akan bertugas 3 orang pencacah.

Proses pengumpulan data lapangan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pengumpulan data awal yang komprehensif dan memverifikasi data temuan pada tahap pertama. Setelah data penelitian yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif (deskriptive statistic) dan kualitatif (analisis logis dan komparatif). Hasil pengolahan dan analisis data akan dijadikan landasan penyusunan rekomendasi kebijakan. Kemudian untuk memvalidasi rumusan kebijakan dan rekomendasi yang akan diambil untuk disampaikan kepada pihak pemangku kebijakan dilakukan diskusi kelompok secara terfokus (Focus Group Discussion) dengan ketua MKKS kabupaten/kota, para kepala SMK sasaran dan para pemangku kebijakan yang berkepentingan dalam revitalisasi SMK dalam penelitian ini.

Pelaksanaan penelitian tentang analisis efektivitas revitalisasi SMK ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama yaitu tahap proses pengumpulan data awal meliputi klasifikasi jenis dan jumlah SMK yang komprehensif dan memverifikasi data temuan. Pada tahap kedua dilakukan wawancara, observasi dan memverifikasi data dan dianalisis efektivitas revitalisasi serta dilakukan diskusi kelompok secara terfokus (FGD).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kajian Efektivitas Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terkait dengan upaya revitalisasi SMK dan juga dalam upaya mewujudkan sekolah bermutu menuju Aceh Carong, dilakukan di 3 (tiga) kabupaten/kota, dimana jumlah sekolah tiap kabupaten dipilih 3 (tiga) sekolah sebagai sampel. Dasar pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kesepakatan antara tim revitalisasi, juga berdasarkan pada penjurusan di SMK. Sekolah yang dijadikan sebagai sampel adalah sekolah-sekolah yang berbeda jurusannya. Dimana tiap kabupaten ada 3 (tiga) orang emurator untuk mencari informasi dan mengumpulkan data. Pengumpulan data yang dilakukan adalah data guru berdasarkan bidang studi, dan kompetensi yang dimiliki serta data sarana dan prasarana laboratorium yang ada di tiap sekolah. Selain pengumpulan data primer juga dilakukan wawancara dengan kepala sekolah, ketua MKKS kabupaten/kota dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana atau kepala laboratorium untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan data revitalisasi.

Penelitian tentang Analisis Kajian Efektivitas Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mewujudkan sekolah bermutu menuju Aceh Carong, pada tahap pertama dilakukan pengklasifikasian jenis jurusan dan jumlah SMK di tiap Kabupaten/Kota. Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber berkenaan dan juga berdasarkan dari rekomendasi Ketua MKKS Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Jumlah SMK dan jenis jurusan yang ada di sekolah dimatangkan. Pada penelitian Kajian Pemetaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Mewujudkan Sekolah Bermutu Menuju Aceh Carong, telah dilakukan pemetaan terhadap 18 SMK dari 6 (enam) kabupaten untuk direvitalisasi dan masih perlu dilakukan secara komprehensif terkait dengan sarana dan prasarana SMK di Aceh secara menyeluruh (sensus), sehingga sekolah-sekolah sasaran revit sesuai dengan yang diinginkan.

Matrik jenis Jurusan dan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menjadi sasaran atau sampel dalam penelitian analisis kajian efektifitas revitalisasi SMK di Aceh Tahun 2020 untuk mewujudkan sekolah bermutu menuju Aceh Carong tiap Kabupaten/Kota Program/jurusan yang terdapat di SMK bervariasi dan kebanyakan tidak memperhatikan potensi daerah yang ada, dan juga jurusan/program yang tidak sesuai dengan kompetensi sekolah tersebut. Sebaiknya untuk program/jurusan yang ditawarkan untuk revitalisasi adalah jurusan/program yang disesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga para lulusan dapat terserap di dunia usaha dan dunia industri. Akan tetapi, sebaiknya program/jurusan ditawarkan harus sesuai dengan potensi daerah, sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang tersedia. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang layak dan yang direkomendasikan oleh ketua MKKS Kabupaten/Kota menjadi model bagi SMK dan jurusan yang akan direvitalisasi, yaitu:

1. Kabupaten Aceh Besar : SMKN 1 Masjid Raya dengan bidang keahlian Kriya, dan SMKN 1 Al-Mubarakya dengan bidang keahlian adalah Teknologi Komunikasi Jaringan (TKJ).
2. Kota Banda Aceh : SMKN 1 Banda Aceh dengan bidang keahlian Bisnis dan Manajemen, SMKN 2 Banda Aceh dengan bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, dan SMKN 3 Banda Aceh dengan bidang keahlian Parawisata.
3. Kota Sabang : SMKN 1 Sabang dengan bidang keahlian Perhotelan.
4. Kabupaten Pidie : SMKN 1 Sigli dengan bidang keahlian Manajemen dan Parawisata, SMKN 2 Sigli dengan bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, dan SMKN 3 Sigli dengan bidang keahlian Kemaritiman dan Informatika Teknologi.
5. Kabupaten Pidie Jaya : SMKN 1 Bandar Baru dengan bidang keahlian Teknik Otomotif dan Agribisnis Tanaman, SMKN 1 Bandar Dua dengan bidang keahlian Agribisnis Ternak dan Perikanan, dan SMKN 1 Tringgadeng dengan bidang keahlian Akuntansi dan Keuangan serta Tata Busana.
6. Kabupaten Aceh Barat : SMKN 2 Meulaboh dengan bidang keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, SMKN 4 Meulaboh dengan bidang keahlian Energi dan Pertambangan, dan SMKN 1 Meureubo dengan bidang keahlian Agribisnis Perikanan air tawar.

Kesesuaian Program Keahlian Yang Dibuka Di SMK dengan Dukungan Potensi Sumber Daya Alam dan Karakteristik Daerah

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa program keahlian yang dibuka pada SMK di seluruh Aceh tidak sesuai ditinjau dari dukungan tenaga pendidik 63% dan 61% dari dukungan karakteristik daerah (Litbang Bappeda, 2019). Belum ada satupun SMK di Aceh baik negeri maupun swasta yang sudah mampu memenuhi standar tenaga pendidik (baik kuantitas maupun kualitasnya), tenaga kependidikan dan tenaga laboratorium. Kondisi yang paling rendah tingkat keterpenuhannya adalah untuk guru bidang keahlian (produktif) sesuai dengan yang dideskripsi oleh Kabid. SMK Dinas Pendidikan Aceh, Ketua MKKS SMK Aceh dan Ketua-ketua MKKS kabupaten/kota yang rata-rata baru mencapai 35% (kuantitas) dengan kualitas umumnya sedang (FGD Online - Analisis Efektivitas Revitalisasi SMK di Aceh, 7 Juli 2020).

Selain masalah tenaga pendidik, kesesuaian program keahlian dengan karakteristik daerah juga masih banyak masalahnya. Sekolah pada umumnya masih lebih berorientasi pada memperbesar jumlah peserta didik yang memang sejalan dengan permintaan masyarakat sekitar sekolah (wawancara dengan perwakilan ketua MKKS dan Kepala sekolah). Masih banyak orang tua siswa yang "berspekulasi" bahwa dengan pendidikan anak mereka pada keahlian yang masih banyak dibutuhkan oleh dunia kerja anak-anak mereka akan mudah mendapatkan pekerjaan di wilayah-wilayah lain. Memang ada situasi yang mendukung tindakan spekulatif mereka (walapun sangat kecil jumlahnya) yaitu memfasilitasi praktik tambahan di luar sekolah pada industri-industri skala kecil dan menengah (pengelasan, otomotif, alat-alat pertanian) yang ada di desa, di kota kecamatan dan kabupaten mereka dengan tanpa menuntut diberikan gaji bahkan ada yang dengan mendukung pengadaan bahan dan alat tambahan yang dibutuhkan pada kegiatan tersebut. Beberapa di antara mereka juga memfasilitasi anaknya belajar bahasa asing secara privat atau pada lembaga-lembaga kursus (wawancara dengan perwakilan orang tua siswa).

Deskripsi mendetil tentang kedua faktor pendukung program keahlian untuk pemahaman kondisi yang lebih baik dan komprehensif termasuk kendala-kendala yang dihadapi akan disajikan pada kedua poin sebagaimana di bawah ini.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Berbicara tentang Sumber Daya Manusia (SDA) di SMK, dua jenis utama SDA yang paling banyak menjadi sorotan sebagai masalah yang sudah "turun-temurun" dialami oleh satuan pendidikan vokasi ini tidak hanya di Aceh tetapi di Indonesia secara keseluruhan yaitu guru (khususnya guru bidang keahlian) dan tenaga laboratorium.

Walaupun ada dua kebijakan besar yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Aceh secara intensif dalam 10 tahun terakhir berupa pendidikan calon guru dan penambahan guru melalui pendidikan keahlian ganda, kenyataannya masih banyak sekali kekurangan guru bidang keahlian. Bidang keahlian yang paling banyak kekurangannya berturut-turut adalah teknologi rekayasa, teknologi rekayasa kemaritiman, dan seni dan industri kreatif (Litbang Bappeda, 2019). Keahlian pertama masih kekurangan sekitar 70% tenaga pendidik dan 60% tenaga laboratorium. Keahlian kedua kekurangan sekitar 60% tenaga pendidik dan 50% tenaga laboratorium. Keahlian ketiga kekurangan sekitar 55% tenaga pendidik dan 50% tenaga laboratorium. Keahlian keempat kekurangan sekitar 45% tenaga pendidik dan 50% tenaga laboratorium. Keahlian kelima kekurangan 40% tenaga pendidik dan 45%.

Sejalan dengan upaya penambahan guru bidang keahlian di SMK, penambahan tenaga laboratorium juga dilakukan dengan berbagai strategi terutama melalui program magang bekerjasama dengan perusahaan dan industri. Dalam acara FGD Daring (Litbang Bappeda, 2020) muncul masukan agar Pemerintah meniru model Jerman dalam merekrut guru dan tenaga laboratorium yaitu menarik tenaga-tenaga terbaik dari dunia industri dengan kompensasi gaji yang setimpal. Memang kalau membandingkan negara kita dengan Jerman masih sangat jauh "panggung dari api" karena Jerman adalah salah satu negara di dunia yang memberikan apresiasi atau gaji terbesar bagi profesi guru. Namun, upaya ini harus terus diupayakan dengan pengembangan jangka panjang yang dilakukan melalui kebijakan "hebat" yang kembali perlu dibuat berupa "Seleksi alumni lima terbaik SMA dan SMK untuk diberikan beasiswa ikatan dinas belajar S-1 dan S-2 bidang- bidang keahlian SMK di dalam dan luar negeri sebagai calon guru SMK dengan besaran gaji dan tunjangan keahlian tinggi." Di samping

itu, melalui kebijakan pengembangan profesionalisme guru SMK yang berumur maksimal 45 tahun untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diperkuat dengan magang) dengan bekerjasama dengan Pemerintah negara-negara berpendidikan vokasional terbaik di dunia seperti Swiss, Jerman, Finlandia, Korea Selatan dan Jepang juga dengan apresiasi atau tunjangan keahlian tinggi pasca pendidikan.

Penyiapan tenaga laboratorium yang mengacu Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 bukan pekerjaan yang mudah bagi Aceh dengan kendala-kendala sangat berat pada kurangnya lembaga-lembaga pelatihan ketrampilan, dan dunia usaha dan industri yang memiliki laboratorium yang memenuhi standar dan mampu memberikan ketrampilan yang mumpuni kepada para calon tenaga laboratorium.

Karakteristik daerah yang dimaksudkan di sini adalah potensi atau komoditas yang mendukung proses pendidikan dan pembelajaran dan kebutuhan wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya akan lulusan satpen SMK. Karakteristik daerah harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam membuka suatu bidang keahlian di SMK. Namun, terdapat banyak SMK di hampir semua kabupaten dan kota yang membuka berbagai bidang keahlian walaupun kurang didukung oleh karakteristik daerah (Litbang Bappeda, 2019). Kenyataan ini terjadi akibat desakan masyarakat sekitar yang berorientasi kepada adanya ijazah SMK dengan sebutan keahlian tertentu yang dipikirkan akan membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi kreatif sendiri. Di pihak lain, sekolah juga memiliki target penambahan sebanyak mungkin jumlah peserta didik walaupun disadari bahwa sebagian besar standar untuk keahlian tertentu tersebut masih jauh dari terpenuhi. Pemenuhan persyaratan ini harus benar-benar menjadi perhatian kembali dalam menuntaskan perjalanan program revitalisasi SMK. Beberapa "tindakan" tegas untuk menata SMK dengan menyesuaikan karakteristik daerah, keterpenuhan standar proses pendidikan dan pembelajaran, ketersediaan DUDI, daya serap lulusan dan peluang menjalankan usaha kreatif harus benar-benar diambil. Memang tindakan tegas ini akan sedikit terhambat dengan resistensi di kalangan pemangku kepentingan SMK setempat namun beberapa kompensasi bisa dimunculkan untuk mengurangi resistensi demikian. Kajian untuk kesuksesan program revitalisasi SMK sudah banyak dilakukan dan didiskusikan dengan cermat dan sudah memunculkan rumusan-rumusan "proxy indikator" yang bisa dirujuk sebagai konsep berjalan peta jalan (road map) revitalisasi SMK di Aceh.

Strategi dan Pengembangan Serta Implementasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi Aceh

Beberapa langkah dalam menjalankan strategi Pengembangan Serta Implementasi Revitalisasi Pendidikan vokasi sangat penting menjadi perhatian untuk dijalankan dengan cermat dengan perencanaan yang tervalidasi dengan baik.

Kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan Dinas Pendidikan

Kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan Dinas Pendidikan Aceh sudah sejak lama terjalin. Peran dan dukungan Universitas Syiah Kuala terhadap kemajuan dan pengembangan Pendidikan Aceh sangat besar. Sebagai universitas tertua dan kebanggaan rakyat Aceh, Universitas Syiah Kuala telah berperan aktif baik dalam menyiapkan guru dan tenaga kependidikan maupun dalam pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Aceh. Beberapa Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) telah dilakukan antara Universitas Syiah Kuala dengan Dinas Pendidikan Aceh, antara lain tertuang dalam; 1) Nota Kesepahaman antara Dinas Pendidikan Aceh dan Kantor Urusan Internasional Universitas Syiah Kuala Nomor : 421.5/C/9545/2019 dan Nomor : B/312/UN11.310/TU/2019 sepakat mengadakan Kerjasama dalam rangka memberikan kesempatan bagi siswa-siswi dari Aceh yang tercerdas dan terbaik untuk belajar di Dalam dan Luar Negeri melalui Dinas Pendidikan Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2) Nota Kesepahaman antara Dinas Pendidikan Aceh dan Kantor Urusan Internasional Universitas Syiah Kuala Nomor; 424/C/10545/2019 dan Nomor : B/401/UN11.3.10/TU/2019 sepakat mengadakan Kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Aceh Provinsi Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya juga akan diadakan kerjasama Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dengan Dinas Pendidikan Aceh dalam hal ; 1) rekrutmen siswa-siswi terbaik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Aceh untuk dididik di Program Studi Sarjana Terapan (Diploma-IV) untuk

bidang teknik mesin, teknik sipil, dan teknik listrik, 2) Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) guru-guru produktif dan tenaga kependidikan (teknisi dan laboran) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Teknologi dan Rekayasa, 3) Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala.

4. KESIMPULAN

Sesuai dengan permasalahan yang dicoba mencari solusi berdasarkan data dan analisisnya dengan didukung oleh hasil kajian literatur dan metodologi yang akurat dari penelitian ini, dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa Jurusan/Program tidak mencerminkan arah revitalisasi SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI) yang berprinsip link and match. Kondisi ini muncul antara lain sebagai akibat dari pemberian izin pembukaan jurusan yang tidak selektif.
2. Jalinan kemitraan dengan DUDI untuk memperoleh pengakuan (sertifikasi) dalam rangka serapan alumni belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan DUDI terhadap sekolah, kurikulum kurang sesuai dengan kebutuhan DUDI dan terbatasnya DUDI di daerah.
3. Ketersediaan data, yaitu jumlah siswa, jumlah guru produktif, sarana dan prasarana, animo masyarakat dan alumni yang terserap sebagai dasar merekomendasikan suatu SMK masuk program revitalisasi adalah kurang.
4. Syarat pendirian unit usaha yang bisa memperoleh bantuan modal dengan rekomendasi BLUD terlalu banyak dengan birokrasi rumit menyebabkan SMK sulit mengembangkan unit usaha yang sebenarnya berfungsi sebagai inkubator bisnis untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda.
5. Terbatasnya bantuan pemerintah daerah untuk percepatan pemenuhan standar sarpras dan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan data sekunder yang disadur dari beberapa penelitian terkait lainnya dan data primer yang diperoleh melalui hasil diskusi kelompok terfokus dan wawancara langsung (face to face) terbatas dan wawancara online dalam kegiatan Webinar, maka diajukan beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan efektivitas revitalisasi SMK di Aceh dan dapat dijadikan sebagai bahan berpijak bagi pemangku jabatan dalam rangka revitalisasi SMK di Aceh sebagai berikut:

1. Dibutuhkan kebijakan yang tegas untuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Aceh. Hal ini harus tercermin dari kebijakan anggaran dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kemampuan dan kompetensi unggul di sekolah dan dinas pendidikan.
2. Diperlukan penyediaan formasi guru produktif PNS secara berkelanjutan setiap tahunnya dengan benar-benar mempertimbangkan data yang valid di atas.
3. Mengingat sudah tidak jelasnya status tentang SMK rujukan kecuali yang sudah mendapatkan program revitalisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam 3 tahun terakhir, maka diperlukan penguatan implementasi Kebijakan SMK Rujukan di setiap kabupaten/kota di Aceh dari Pemerintah Aceh sebagai bagian dari revitalisasi SMK.
4. Rencana implementasi Kebijakan Centre of Vocational Excellence (CoVE) sebagai pengganti program revitalisasi SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah SMK dan bidang keahlian yang sangat terbatas yang dan tidak merata di seluruh kabupaten/kota menimbulkan efek yang kurang bagus untuk pengembangan standar nasional pendidikan (SNP) pada semua SMK. Pemerintah Aceh harus mengajukan penambahan jumlah SMK dan bidang keahlian paling kurang masing-masing satu SMK dengan dua bidang keahlian prioritas sesuai karakteristik kabupaten/kota.
5. Mendirikan Teaching Factory Berbasis Edutechnopreneur Islami di SMK, yang didukung dengan regulasi keuangan unit produksi yang tepat sesuai kebutuhan sekolah sebagai BLUD.
6. Teaching Factory (TEFA) adalah pembelajaran yang berorientasi bisnis dan produksi. Atau suatu proses keahlian atau keterampilan (life skill) dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen.

7. Melatih guru terkait implementasi Teaching Factory dan pengetahuan serta keterampilan pendukungnya, dan menyediakan alat bagi terlaksananya Teaching Factory.
8. Menyediakan modal usaha bagi Teaching Factory dan bahan praktik secara reguler (habis pakai).
9. Menyediakan program magang guru dan siswa di industri sesuai kompetensi keahlian., dan menyediakan dana bantuan bagi siswa pada masa Praktek Kerja Lapangan/prakerin.
10. Menerbitkan regulasi daerah untuk mendorong industri lokal kelas menengah menggunakan tenaga kerja bersertifikat lulusan SMK secara bertahap.
11. Mendorong SMK untuk mandiri mengelola dan membiayai kebutuhan hariannya melalui Tefa, dimana Tefa juga mendorong skill siswa sesuai standar industri. SMK kita butuh alat untuk Tefa, dan pelatihan Tefa berbasis Edutechnopreneur Islami.
12. Meningkatkan industri kreatif mandiri yang padat karya bagi para lulusan SMK, yang tidak tergantung dengan sertifikasi dan DUDI untuk dapat bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Litbang Bappeda Aceh (2019). *Kajian Pemetaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Mewujudkan Sekolah Bermutu Menuju Aceh Carong*.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st century skills: Learning for life in our times*. Jossey-Bass/Wiley.
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional